

KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENJAGA EKSISTENSI NILAI KEBUDAYAAN DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA¹

Oleh : Fridolin Wisora Balida²

ABSTRAK

Nilai-nilai budaya lokal sangat penting bagi kehidupan social. Selain itu Kondisi budaya daerah justru dinilai memprihatinkan karena sudah tidak diperhatikan lagi oleh sendiri. Tidak terkecuali di kabupaten Halmahera Utara. Seiring berkembangnya zaman, di Halmahera Utara nilai-nilai kebudayaan sudah terkikis. Hal ini disebabkan karena tuntutan perubahan dari dalam masyarakat sendiri terutama yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Hambatan lain juga adalah minimnya dukungan pemerintah, terutama dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan kebijakan untuk pementasan dan pergelaran seni budaya sangat minim sekali. Keadaan seperti itu dampaknya masyarakat lebih mencintai kebudayaan luar dari pada kebudayaan dari daerah sendiri. Nilai-Nilai Hibualamo (rumah besar) seperti o'dora, o'hayangi, o'baliara, o'adili, sudah tidak lagi menjadi nilai-nilai fundamental bagi kehidupan social.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai Bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara dalam menjaga eksistensi nilai kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara dan Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjaga eksistensi nilai kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan lima indikator kinerja untuk menilai kinerja dari dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Halmahera utara yaitu produktifitas, responsibilitas, responsivitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas, belum sesuai dengan peraturan bupati No 6 tahun 2011 yang mengatur tentang tupoksi dari dinas pariwisata dan kebudayaan dimana tugasnya adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Rekomendasi untuk stakeholder adalah agar Untuk meningkatkan kinerja dari DISPARBUD Halmahera Utara, maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat serta semua tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk saling memberikan masukan terhadap instansi ini supaya mereka bisa bekerja lebih baik lagi. DISPARBUD kabupaten Halmahera Utara, harus lebih meningkatkan sosialisasi program disetiap lembaga-lembaga pendidikan serta masyarakat didaerah perkotaan agar nilai-nilai budaya yang ada di Halmahera Utara tidak terkikis akibat arus modernisasi, serta benar-benar mengimpelmentasikan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari DISPARBUD. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPARBUD harus bekerja sama dengan instansi terkait, serta melibatkan kepala-kepala desa yang ada di kabupaten Halmahera utara. Sosialisasi budaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini DISPARBUD bekerja sama dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat di setiap kesempatan.

Key Words : Kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan Nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Otonomi daerah bidang sosial budaya diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Maka oleh karena itu visi otonomi daerah dibidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, bahasa, karya seni, karya cipta, dan karya sastra lokal dan dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan disekitarnya dan kehidupan global. Oleh karena itu aspek sosial budaya harus diletakan secara tepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga utuh dan eksistensi budaya lokal tetap terjaga dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan sosial budaya dapat diharapkan akan menyumbang peran dalam meredakan ketegangan antar kelompok masyarakat untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu diharapkan dapat mengembangkan nilai budaya baru yang positif, produktif, dan semakin memperkuat jati diri bangsa serta meningkatkan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kekayaan budaya. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kurangnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah didalam pengelolaan kekayaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga kualitas layanannya kurang optimal. Budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diperhatikan secara serius dan seksama, terutama dalam memasuki era otonomi daerah. Hal ini dikarenakan budaya daerah dapat memberi andil yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa dan proses regenerasi bangsa. Pada masa sekarang ini seni budaya daerah sudah mulai terkikis dan tergerus oleh budaya luar serta tidak sedikit pula budaya kita yang diklaim oleh bangsa lain.

Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi budaya dari berbagai suku dan agama. Karena penduduk di daerah ini sudah berasimilasi dengan suku-suku yang ada di Indonesia sehingga di daerah ini disebut dengan daerah yang memiliki budaya supra etnis.

Masyarakat Halmahera Utara memiliki budaya yang sudah ada ratusan tahun dan sampai saat ini masih terjaga kelestariannya sebagai nilai-nilai budaya yang filosofis. Nilai-nilai budaya ini mejadi sebuah tatanan atau tradisi yang tetap dipertahankan. Baik secara seremonial ataupun secara resmi. Hibualamo (rumah besar) sebagai rumah adat atau wadah yang diabadikan oleh masyarakat Halmahera utara. Seiring berkembangnya zaman, di Halmahera Utara sepertinya telah terjadi kulrturasi budaya. Satu hal yang perlu dikoreksi adalah kurang peduli dan konsistennya masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan sehingga bisa memunculkan berbagai

dikonomi persepsi. Apakah dari kalangan masyarakat, mahasiswa, para politisi dan juga pemerintah daerah Halmahera Utara dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hal ini disebabkan karena tuntutan perubahan dari dalam masyarakat sendiri terutama yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, juga dorongan yang kuat dari luar masyarakat yang berhubungan dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan.

Kondisi Aktual budaya lokal

1. Lembaga-lembaga adat atau pemerintahan adat sebagai produk budaya lokal yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat relative tidak lagi berfungsi atau tidak difungsikan lagi (contoh: Bagaimana eksistensi dan peran *oadati ma bobareta, jiko makolano, dimono/adati ma masahe, kapita dll*, sebagai pengayom masyarakat adat).
2. Pranata sosial budaya lokal yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lemah dan relatif tidak berfungsi karena telah terjadi perubahan pandangan masyarakat tentang pranata-pranata sosial budaya. Pranata sosial budaya lokal telah dianggap sebagai produk masa lampau, kuno dan tidak memenuhi harapan masa depan. (contoh: bagaimana dengan *hirono/bari* sebuah system tolong-menolong dengan cara pengerahan tenaga dan bersifat resiprositas atau pranata lainnya, *himatagali*/pertukaran yang memperlihatkan hubungan totalitas dua kelompok dalam upacara perkawinan dan kematian apakah masih eksis)
3. Penggunaan bahasa lokal yang memperlihatkan identitas kelompok masyarakat pendukung suatu kebudayaan cenderung tidak lagi digunakan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu (Melayu Ternate atau Melayu Ambon) atau bahasa “Melayu Pasar” yang digunakan sebagai bahasa komunikasi atau bahasa pergaulan. Bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintah atau disekolah-sekolah, juga di tempat-tempat Ibadah dan bahasa lokal digunakan hanya pada waktu upacara-upacara adat/tradisional. (bagaimana dengan bahasa Tobelo, Galela, Tobaru, Kao, yang lama kelamaan tidak lagi dipraktikkan, dan sebagainya).
4. Sistem nilai budaya yang dikenal sebagai adat merupakan otoritas tradisional yang berfungsi mempersatukan masyarakat adat, relatif masih dipatuhi di wilayah pedesaan, akan tetapi di wilayah perkotaan, otoritas tradisional tersebut cenderung tidak lagi dipatuhi.

Mengapa hal ini terjadi?

1. Nilai budaya lokal yang ditawarkan melalui media komunikasi dan informasi modern telah mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat cenderung mengadopsi nilai-nilai budaya global. Pranata-pranata sosial budaya lokal dianggap tidak lagi mampu menampung kebutuhan masyarakat yang berkembang
2. Tidak dapat disangkal juga bahwa agama juga mempunyai kontribusi yang besar untuk melemahkan peran budaya lokal. Agama melarang berbagai kegiatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma agama. Peran adat cenderung dihubungkan dengan berbagai kepercayaan tradisional, kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang (*o gurumini*).
3. Sosialisasi nilai-nilai budaya local yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat relative jarang dilakukan, demikian halnya pendidikan kebudayaan tidak diselenggarakan disekolah-sekolah sebagai muatan local.
4. Tidak terdapat pula kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk mengembangkan identitas local sebagai bagian dari identitas nasional dan juga untuk membangun kehidupan bersama masyarakat serta membangun ketahanan social budaya masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “***Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjaga eksistensi nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara***”

Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang diatas, mengenai mengapa penelitian ini harus dilaksanakan, dapat diambil sebuah rumusan masalah pokok dari penelitian ini yaitu: Bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjaga eksistensi nilai kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjaga eksistensi nilai kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi, masukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara dalam Kinerjanya dalam menjaga eksistensi nilai Kebudayaan.
2. Manfaat Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik serta pemerintahan dan bisa menambah wawasan bagi kalangan akademik.

KERANGKA TEORI

Kinerja

Definisi Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dwiyanto (2006:50-51), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut.

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang

- selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.
2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.
 3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
 4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit Lenvine dalam Dwiyanto (2006:51). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
 5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun

akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28). Sedangkan defenisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).

Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan kebudayaan adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Dinas ini bertugas melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pariwisata dan kebudayaan.

Dalam menjalankan tugasnya terutama dalam melestarikan nilai kebudayaan, dinas ini menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas, dan bidang – bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan serta dinas ini bertanggung jawab kepada bupati, ada pun acuan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya untuk melestarikan nilai kebudayaan seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 32 yaitu :

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dari pasal tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks. Dalam menyelenggarakan Kepala Dinas mempunyai fungsi berdasarkan keputusan Bupati No 6 Tahun 2011 dinas pariwisata kabupaten Halmahera utara berfungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan tehnis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Bidang-Bidang dengan mengacu pada pola dasar pembangunan dan Renstra kabupaten sebagai satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Pemasaran;
 - d. Merumuskan kebijakan teknis bidang-bidang berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi yang obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - f. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
 - g. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja dengan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - h. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang-bidang sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pelayanan umum dan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Konsep Kebudayaan

Kata “Kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian ke-budaya-an dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”.

Defenisi Kebudayaan tertua dan terlengkap dikemukakan oleh tokoh aliran evolusionisme Inggris E. B. Tylor, dalam karyanya yang terbit pada 1871, *Primitive Culture*, yang menyatakan bahwa “*Culture, or civilization... is that complex whole which include knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*” (Tylor dikutip dari Miller and Weitz 1979:300). Dalam Bahasa Indonesia, defenisi tersebut kurang lebih berbunyi: kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan Ralph Linton dari aliran antropologi psikologi mengemukakan defenisi kebudayaan hampir sama dengan defenisi kebudayaan Tylor, yaitu: kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh dari masyarakat lebih tinggi atau lebih diinginkan. Dalam arti cara hidup masyarakat itu kalau kebudayaan diterapkan pada cara hidup kita sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan piano atau membaca karya sastra terkenal. Untuk seorang ahli ilmu sosial, kegiatan seperti main piano itu, merupakan elemen-elemen belaka dalam keseluruhan kebudayaan kita. Keseluruhan ini mencakup kegiatan-kegiatan duniawi seperti mencuci piring atau menyetir mobil dan untuk tujuan mempelajari kebudayaan, hal ini sama derajatnya dengan “hal-hal yang lebih halus dalam kebudayaan”. Karena itu, bagi seorang ahli ilmu sosial tidak ada masyarakat atau perorangan yang tidak berkebudayaan, bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah makhluk berbudaya, dalam arti mengambil bagian dalam suatu kebudayaan (Linton dikutip Ember and Ember 1990: 180).

Demikian juga Koentjaraningrat membuat pengertian kebudayaan yang mirip sekali dengan pengertian kebudayaan Tylor, yakni: kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. Menurut pendapat Kirk dan Miller (Moleong, 1998:3) dinyatakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan”. Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dalam hal menjaga eksistensi Nilai Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas tersebut.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, karena penulis tertarik pada masalah Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selain itu juga peneliti sebagai putra daerah setempat merasa prihatin dengan sektor budaya yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan.

Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan "*purposive sampling*" atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128). Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, dan Tokoh Adat Masyarakat Hibualamo.

Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen penelitian adalah penulis sendiri. Dimana penulis sendiri yang melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan data ada penulis sendiri.

Dengan pedoman wawancara yang ada peneliti bertanya kepada informan tentang Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu juga penulis menggunakan catatan lapangan yakni mencatat apa yang di dengar dan dipikirkan dalam kaitannya dengan pengumpulan data dilokasi. Penulis juga menggunakan alat perekam dan kamera sebagai alat bantu lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-dephtinterview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjarangan informasi akan di akhiri.

2. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Observasi (pengamatan lapangan)

Yaitu dilakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial di sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada lapangan.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, data dianalisis serta dideskripsikan karena menurut Sugiyono, (1999) data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengkaji kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara dalam menjaga eksistensi nilai kebudayaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sehingga data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari miles dan huberman (2001:20), yakni analisis data yang dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai selesai peneliian secara bersamaan, yakni sebagai berikut :

1). Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang akan diperoleh dari lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya yang terfokuskan pada masalah yang dikaji.

2). Penyajian Data (*Data Display*)

Langka ini bertujuan memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain, hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu, yakni sistematis dan sederhana dengan sosoknya yang lebih mantap dan utuh.

3). Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal dan selama proses pengumpulan data penulis mencari hal-hal yang sering timbul dan berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.

TEMUAN PENELITIAN

Pembahasan dilakukan mengacu pada hasil rangkuman wawancara. Pembahasan lima indicator pengukuran kinerja menurut Dwiyanto (1995;9) yaitu; produktifitas, untuk mengukur efektifitas dan efesiensi kualitas pelayanan, responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas. Kelima indicator ini akan dibahas sebagai berikut:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

Produktivitas berhubungan erat dengan efektivitas pencapaian hasil dan efisiensi pengelolaan atau penggunaan sumber. Menurut The Liang Gie (1962;7) efisien adalah pengertian yang menggambarkan adanya perbandingan terbalik antara suatu usaha dengan hasil yang dicapai dalam usaha tersebut. Perbandingannya dilihat dari dua segi:

1. Dilihat dari segi hasil, suatu usaha dikatakan efisien kalau usaha itu memberikan hasil yang terbaik, baik mutu maupun jumlah.
2. Dari segi usaha, suatu usaha dikatakan efisien kalau suatu hasil yang dikehendaki dapat dicapai dengan usaha yang ringan.

Sedangkan menurut Staf Dosen BPA UGM Yogyakarta, (2000:109) efektivitas adalah suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap perbuatan yang efisien, tentu saja berarti efektif, karena dilihat dari hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah dicapai. Sehingga berdasarkan hasil definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja merupakan perbandingan antara jam kerja yang digunakan dengan hasil kerja yang dicapai.

Dilihat dari penjelasan dan rangkuman hasil wawancara maka dalam poin ini peneliti mencoba mengkombinasikan antara definisi di atas mengenai produktivitas di atas dengan tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaan dalam peraturan Bupati no 06 Tahun 2011 yaitu Dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pariwisata dan kebudayaan. Dari hasil observasi dan wawancara, yang ditemui di lapangan dalam menjalankan tugas tersebut kinerja dari Dinas pariwisata dan kebudayaan belum berjalan efisien, ini mampu dilihat dari masih kurangnya sosialisasi tentang nilai-nilai budaya, yang pada akhirnya masyarakat pada umumnya sudah tidak lagi menggunakan nilai-nilai budaya sebagai landasan hidup. Dari segi kepuasan masyarakatpun masih kurang puas dalam menyikapi kinerja dari dinas pariwisata dan kebudayaan.

2. Kualitas Pelayanan

Isu mengenai kualitas pelayanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

Berdasarkan konsep diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan, sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara yang berbicara soal kualitas pelayanan DISPARBUD belum maksimal. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa DISPARBUD harus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam hal pelestarian nilai-nilai budaya. Dari segi kualitas pelayanan selama ini dalam pelestarian nilai-nilai budaya hanya dalam tataran birokrasi, misalnya pemakaian baju adat yang diharuskan untuk dipakai setiap hari rabu dan kamis. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari DISPARBUD belum memadai.

3. Responsivitas

Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa responsivitas adalah kemampuan dari DISPARBUD Halmahera Utara menjawab keinginan masyarakat. Dari hasil observasi dan hasil wawancara belum sepenuhnya dinas ini menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal menjaga nilai-nilai budaya, seharusnya dinas ini lebih peka dalam merespon apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang adalah informan bahwa masyarakat menginginkan sosialisasi nilai-nilai budaya kepada anak-anak sekolah, melaksanakan lomba-lomba tarian adat seperti cakalele, tide-tide dan lain-lain, supaya masyarakat lebih mengenal budaya dan adat mereka.

4. Responibilitas

Responibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Oleh sebab itu, responibilitas bisa saja suatu ketika bebrbenturan dengan responsivitas. Sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara bahwa kinerja dari DISPARBUD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari dinas ini sesuai dengan peraturan Bupati no 06 Tahun 2011 dimana salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembinaan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya.

5. Akuntabilitas

Dalam arti sempit Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan

perwujudan bentuk dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan misi instansi dalam bentuk aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemangku jabatan. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban dari dinas sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil rangkuman wawancara dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Diukur dengan indikator produktivitas, DISPARBUD belum melaksanakan fungsinya dengan baik yang mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan. Ini mampu dilihat dari kurangnya kerja sama antar instansi terkait serta lembaga-lembaga pendidikan.
2. Diukur dari indikator Kualitas Pelayanan belum maksimal, hal ini mampu dilihat dari kurangnya sosialisasi program kerja ditingkat kecamatan sampai di tingkat desa, serta lemahnya kesadaran mengenai tugas dan tanggung jawab dari DISPARBUD masih sangat kurang.
3. Diukur dengan indikator Responsivitas DISPARBUD belum peka dalam menjaga eksistensi kebudayaan. Akibatnya banyak pengaruh budaya asing yang menyebabkan masyarakat di daerah perkotaan sudah tidak lagi menjadikan adat budaya sebagai panutan dalam hidup. Ini bisa dilihat dari terkikisnya nilai-nilai dasar budaya bergotong royong, serta pelestarian bahasa sudah terkikis.
4. Diukur dengan indikator Responibilitas kinerja DISPARBUD kabupaten Halmahera Utara belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari DISPARBUD itu sendiri, hal yang mendasari mengapa kinerja dari dinas ini belum maksimal, pemakaian baju adat hanya di tataran birokrasi/pegawai Negeri Sipil di setiap instansi yang dilakukan pada hari rabu dan kamis.
5. Dilihat dari indikator Akuntabilitas bahwa dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Saran.

Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran, untuk ditindak lanjuti pihak terkait, guna mengoptimalkan kinerja dari DISPARBUD kabupaten Halmahera utara saat ini.

1. Untuk meningkatkan kinerja dari DISPARBUD Halmahera Utara, maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat serta semua tokoh adat dan tokoh masyarakat agar saling memberikan masukan terhadap instansi ini supaya mereka bisa bekerja lebih baik lagi.

2. DISPARBUD kabupaten Halmahera Utara, harus lebih meningkatkan sosialisasi nilai-nilai kebudayaan disetiap lembaga-lembaga pendidikan serta masyarakat didaerah perkotaan agar nilai-nilai budaya yang ada di Halmahera Utara tidak terkikis akibat arus modernisasi, serta benar-benar mengimpelmentasikan visi dan misi dan aturan perundang-undangan yang megatur tentang tugas pokok dan fungsi dari DISPARBUD.
3. Agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPARBUD harus bekerja sama dengan instansi terkait, serta melibatkan kepala-kepala desa yang ada di kabupaten Halmahera utara.
4. Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Halmahera utara seharusnya lebih memperhatikan nilai-nilai budaya, karena nilai budaya menunjukkan identitas dan jati diri suatu daerah atau bangsa. Misalnya nilai *o'dora* (saling mengasihi), *o'hayangi* (saling menyayangi), *o'baliara* (saling peduli, melayani) *o'adili* (keadilan), *o'diai* (kebenaran

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Amal. 2013,*Tobelo Tempo Doeloe,Dinas Parawisata Kabupaten Halmahera Utara.*
- Agus Dwiyanto, 2011, *Mengembalikan Kepercayaan Public melalui Reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama.
- Agus Dwiyanto.2006. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public.*Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Irham Fahmi. 2013, *Perilaku Organisasi,Alfabeta.Bandung.*
- Moleong, lexi. 2001,*metodologi penelitian kualitatif, PT. Remaja rosada karya, bandung*
- MiftahThoha. 2007, *Perilaku Organisasi:konsep dasar dan aplikasinya, rajawali pers*
- Sugiono,2010.*Metode penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D),Alfabeta, Bandung.*
- Syamsir Torang. 2013.*Organisasi dan Manajemen,Alfabeta,Bandung.*
- S.S. Duan. 2009, *Hein dan Hibualamo "tobelo Pos"menelusuri jejak kepemimpinannya, tobelopos dan Pemda Kabupaten Halmahera Utara.*
- Tim uspar UGM.*wawasan budaya untuk pembangunan ,pilar politika Yogyakarta.*
- Yeremias T.Keban. *Enam dimensi strategis Administrasi Publik,Gavamedia, Jogjakarta.*
- Zulkifli. 2008. *Antropologi sosial budaya, siddiq press, Yogyakarta*

Sumber lain :

- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 tentang kebudayaan*
- Peraturan Bupati Halmahera Utara No 06 Tahun 2011 Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.*